

**PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DPPKBP3A) DALAM PENANGANAN
TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN
KARIMUN**

**OLEH :
ESTER DWIYANA TUKAN
NIM.190565201109**

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Karimun terus meningkat dari tahun 2020-2022, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran negara melalui DPPKBP3A dalam melakukan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Karimun. Penelitian ini menggunakan teori Biddle dan Thomas yang menggunakan empat indikator, yakni harapan, norma, wujud perilaku, evaluasi dan sanksi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa harapan keluarga korban adalah keluarnya korban dari trauma yang dialami, dan harapan ini telah selaras dengan apa yang dimaksudkan oleh negara. Dalam melaksanakan peran DPPKBP3A dan UPTD PPA mengutamakan norma dalam menjalankan tugasnya tidak hanya berpegang pada peraturan dan Undang-Undang yang ada yakni Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 tentang Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Pada DPPKBP3A Kabupaten Karimun akan tetapi dinas juga bekerja dengan memegang nilai-nilai kemanusiaan dan rasa empati yang tinggi. DPPKBP3A selalu memberikan wujud perilaku atau bukti nyata. Wujud nyata ini terlihat dari apa yang telah dilakukan oleh DPPKBP3A, diantaranya yaitu dengan melakukan pengelolaan kasus, pendampingan korban, mediasi hingga trauma healing untuk fase penanganan. Sementara pencegahan kekerasan seksual di masa yang akan datang dilakukan dengan sosialisasi ke sekolah dan penyuluhan langsung ke masyarakat. Dinas DPPKBP3A Kabupaten Karimun mendapatkan nilai-nilai yang positif di setiap langkah kerjanya. Dengan kata lain keluarga korban telah memberikan pandangan yang positif atas apa yang telah dilakukan oleh DPPKBP3A dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Karimun. Kendala yang dihadapi oleh negara dalam menangani tindak kekerasan seksual terhadap anak yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia, faktor alam dan juga korban yang sulit dimintai keterangan.

Kata kunci : Peran, Pemerintah, Kekerasan Seksual

THE ROLE OF THE SERVICE OF POPULATION CONTROL, FAMILY PLANNING, WOMEN'S EMPOWERMENT, AND CHILD PROTECTION (DPPKBP3A) IN HANDLING ACTS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN KARIMUN DISTRICT

by

**ESTER DWIYANA TUKAN
NIM. 190565201109**

ABSTRACT

Cases of sexual violence against children in Karimun Regency continue to increase from 2020-2022. This research aims to find out the role of the state through DPPKBP3A in handling sexual violence against children in Karimun Regency. This research uses Biddle and Thomas's theory which uses four indicators, namely expectations, norms, forms of behavior, evaluation and sanctions. The type of research used is qualitative descriptive research. Data collected using interview and documentation methods. The results of this research show that the hope of the victim's family is for the victim to escape the trauma they have experienced, and this hope is in line with what is intended by the state. In carrying out the role of DPPKBP3A and UPTD PPA, they prioritize norms in carrying out their duties, not only adhering to existing regulations and laws, namely Regent's Regulation Number 98 of 2022 concerning Organizational Structure and Job Descriptions of Regional Services, Regional Regulation Number 5 of 2018 concerning Implementation of Women's Protection and Children as well as Regent's Regulation Number 1 of 2022 concerning the Formation, Position, Organizational Structure, Duties and Functions, and UPTD Procedures for the Protection of Women and Children in DPPKBP3A Karimun Regency, however, the department also works by upholding human values and a high sense of empathy. DPPKBP3A always provides concrete behavior or evidence. This concrete manifestation can be seen from what DPPKBP3A has done, including case management, victim assistance, mediation and trauma healing for the handling phase. Meanwhile, prevention of sexual violence in the future is carried out through outreach to schools and direct outreach to the community. The Karimun Regency DPPKBP3A Service received positive values in every step of its work. In other words, the victim's family has provided a positive view of what DPPKBP3A has done in dealing with acts of violence against children in Karimun Regency. The obstacles faced by the state in dealing with acts of sexual violence against children are a lack of human resources, natural factors and also victims who are difficult to ask for information.

Keywords: Role, Government, Sexual Violence